

***Implementasi Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020
(Studi Deskriptif: MA Negeri 2 Kota Bandung)***

Oleh:

Ia Siti Aisyah dan Mulyawan Safwandy Nugraha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: iasitiaisyah99@gmail.com

Abstract

Educational institutions are the birthplace of the nation's intellectual generations, in maintaining educational institutions, of course, meeting the needs and expectations of the community towards education must be considered, thus the implementation of community involvement or school committees is needed. Where the purpose of this study is to find out how the implementation of community involvement or committees can be implemented in reality. The research method in this study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the findings obtained by researchers on community involvement or school committees have been well implemented in MA Negeri 2 Bandung City by involving the committee in three ways, including in program planning by holding a meeting every year and inviting the committee to attend. Second, the involvement of the committee in the implementation of the program, this involvement can be in the form of attending the activities directly or providing support in the form of facilities, finance or thoughts. Third, involvement in program control or evaluation by providing direction, input, or evaluating funds that have been used in program implementation.

Keywords: *Implementation, community engagement, education quality, IASP 2020*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu lembaga yang akan melahirkan anak-anak bangsa yang akan meneruskan estafet pembangunan nasional. Satuan Pendidikan bisa melahirkan anak-anak bangsa yang berkompeten serta mempunyai kulit yang baik. Pemahaman serta kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk setiap warga negara yang harus ditumbuhkan kembangkan supaya tujuan Pendidikan bisa tercapai. Namun, dalam menjalankan sistem Pendidikan diperlukannya penguatan instrument dan landasan Pendidikan, supaya Pendidikan yang diharapkan bisa tercapai dengan efektif. Hal yang harus menjadi perhatian untuk membangun kualitas Pendidikan adalah keterlibatan masyarakat di lembaga Pendidikan.¹

Pelibatan masyarakat di lembaga pendidikan sangat penting dan diharapkan terjadi secara nyata bentuk praktik di lapangan, bukan dalam bentuk konsep dan wacana. Selama ini, masyarakat hanya terlibat dalam pendidikan dalam bentuk konsep, wacana, atau slogan. Target pelibatan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, yang meluncurkan konsep Komite Sekolah dan

¹ Triwiyanto, Teguh, Hambatan Implementasi Program Kerja Komite Sekolah untuk Meningkatkan Peran serta Masyarakat, *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 2018, 131-134

Dewan Pendidikan secara resmi, meskipun ada fungsi lokal yang telah menjalankannya sebelumnya. Perspektif pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah membutuhkan pemahaman terkait berbagai pihak, terutama tentang peran mereka dan manfaatnya. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, tertera bahwa keluarga dan masyarakat harus lebih terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah melakukan hal ini dengan membentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.²

Jika ditinjau dari IASP 2020 (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan) pelibatan masyarakat ini menjadi salah satu butir atau poin yang harus ada di Lembaga satuan Pendidikan yang terakreditasi. Dimana IASP 2020 merupakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) yang bisa merubah persepsi penilaian akreditasi yang sebelumnya berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus untuk memberikan pengukuran terhadap proses belajar, mutu lulusan, kualitas guru, serta manajemen sekolah. Dalam IASP 2020, komponen manajemen madrasah salah satu sub-komponennya adalah pelibatan masyarakat. Dimana keterlibatan masyarakat merupakan upaya sekolah untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan baik secara individual maupun komunitas. Dalam IASP 2020 kelompok tersebut antaralain orangtua siswa, komite sekolah, dunia usaha atau Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan program yang ada di sekolah/madrasah. Dukungan tersebut bisa berupa gagasan, dana, sarana, kegiatan dan lain-lain. Kemudian dalam IASP 2020 keterlibatan Masyarakat atau komite bisa diimplementasikan dalam bentuk keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang di adakan di madrasah atau sekolah.

Selain itu, Keterlibatan masyarakat sebagai sumber aspirasi dan tolak ukur kualitas sangat penting. Konsep ini muncul ketika pemerintah menerapkan sistem desentralisasi pendidikan, dan biasanya dianggap sebagai angin segar dalam proses penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat. Konsep bertujuan untuk mendorong komite sekolah dan masyarakat untuk bersatu dan saling melengkapi, dan bahkan dapat memberikan warna pada perumusan standar sekolah. Tidak ada sumber pendidikan yang lebih baik daripada masyarakat sebagai satuan pendidikan. Masyarakat dapat menjadi tumpuan untuk meningkatkan dan memenuhi kualitas pendidikan di sekolah. Namun, banyak institusi pendidikan saat ini masih mengabaikan partisipasi masyarakat dan

² Yunita Endra Megiati, PEMBERDAYAAN Komite Sekolah Kajian Konsep dan Implementasinya, (Jurnal SAP, 2016), 125
234

pengadaan tenaga pendidik. Oleh karena itu, pendidikan saat ini menuntut partisipasi masyarakat yang maksimal.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena tidak setiap Lembaga Pendidikan benar-benar melakukan pelibatan masyarakat dan belum memahami bagaimana pelibatan masyarakat atau komite disekolah bisa di implementasikan dengan baik. Sebagai salah satu sekolah yang dianggap peneliti telah melakukan implementasi pelibatan masyarakat dengan baik dan efektif berdasarkan IASP 2020, maka penelitian ini dilakukan di MA Negeri 2 Kota Bandung. Penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munawir Pohan dengan judul "Peranan Komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan", yang dipublish pada tahun 2018. Yang membedakannya dengan peneliiian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan penelus lebih menekankan tentang bagaiman pengimplementasian Lembaga Pendidikan dalam pelibatan masyarakat berdasarkan IASP 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji pengimplementasian pelibatan masyarakat di madrasah, dimana penelitian ini yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif.²¹ Jika ditinjau dilihat dari kemampuan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi dan wawancara.

Dengan demikian penelitian ini akan lebih membahas bagaimana pelaksanaan atau implementasi Lembaga Pendidikan khususnya MA Negeri 2 kota Bandung dalam pelibatan Masyarakat berdasarkan IASP 2020. Dengan harapan dari pada penelitian ini bisa memberikan gambaran atau acuan untuk Lembaga Pendidikan yang belum memahami bagaimana pelitan masyarakat harus di implementasi secara optimal dan efekti untuk meningkatkan kualita Pendidikan.

B. Pembahasan

1. Definisi Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "implementasi" asal kata dari "pelaksanaan" dalam bahasa Inggris dan berarti "penerapan pelaksanaan" dalam bahasa Indonesia. Arti istilah implementasi merupakan adalah proses melaksanakan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis yang berdampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Implementasi merupakan proses mengubah rencana atau konsep menjadi tindakan nyata yang melibatkan pelaksanaan langkah-langkah yang telah disusun untuk mencapai

tujuan yang telah diputuskan. Implementasi merupakan tahap krusial dalam menghadirkan ide atau rencana ke dalam kehidupan nyata.

Sedangkan menurut Charles O. Jones Implementasi merupakan proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengatur sebuah program. Aktifitas tiga pilar terdiri dari pengoperasian program: a). Organisasi sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program. b). Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan instruksi yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan. c). Aplikasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan rutin untuk layanan, pembayaran, atau hal-hal lain yang disesalkan.³ Dijelaskan dalam pelaksanaan kebijakan bahwa kebijakan sekolah dibuat oleh dewan sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan unsur lainnya yang diberi wewenang untuk membuat kebijakan, termasuk orang yang telah dipilih dan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pendidikan.⁴

2. Konsep dan Peranan Komite Sekolah

Istilah komite sekolah baru diciptakan untuk menggantikan badan pembantu penyelenggara pendidikan. Peran masyarakat berbeda, tetapi kontribusi tetap sama. Peran masyarakat dalam Komite Sekolah dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada dasarnya, komite sekolah adalah organisasi mandiri yang berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam meningkatkan kesetaraan, kualitas, dan efisiensi manajemen institusi Pendidikan.⁵ Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Kemendikbud Nomor 75 tahun 2016 mengenai komite sekolah, didalamnya menyatakan komite sekolah didefinisikan sebagai lembaga mandiri dengan beranggotakan orangtua/wali peserta didik, organisasi sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli akan Pendidikan, kedudukan komite sekolah berada disetiap sekolah yang berfungsi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dan menjalankan fungsinya dengan cara professional, mandiri, demokratis dan akuntabel.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2022, Komite Sekolah bersama Dewan Pendidikan, mempunyai peranan yaitu:

- 1) Memberikan masukan untuk pertimbangan atau nasihat (*advisory agency*) saat perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di suatu madrasah sekurang-kurangnya dalam memberikan saran, pertimbangan, serta rekomendasi kepada

³ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pess, 2012), 118

⁴ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Keimplementasian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015), 132

⁵ Ahmad Sayuti, *Peranan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Mubtadaain, 2022), hlm. 45-57

lembaga pendidikan. Dengan tujuannya agar saran tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan.

- 2) Pendukung (*supporting agency*), dukungan ini bisa diberikan baik dalam bentuk finansial, gagasan, ataupun tenaga dalam pelaksanaan program lembaga Pendidikan. Dengan tujuan untuk mendorong kepedulian dan perhatian komite masyarakat terhadap kualitas Pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) untuk membentuk suatu lembaga Pendidikan yang transparansi serta akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pendidikan dan keluaran pendidikan di lembaga pendidikan, setidaknya lembaga Pendidikan Bersama komite harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program-program, pelaksanaan, dan lulusan dari suatu lembaga pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di lembaga pendidikan, Khususnya dalam membangun kerjasama Bersama masyarakat baik secara perorangan, maupun dalam bentuk organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, mediator juga berperan untuk menerima dan menganalisis aspirasi, gagasan, harapan serta berbagai hal yang dibutuhkan dalam pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.⁶

3. Kualitas Pendidikan: Definisi dan Dimensi Penilaian

Istilah "kualitas pendidikan" mencakup banyak aspek, seperti pengajaran, komponen kurikulum, sarana prasarana, manajemen, serta tenaga pendidik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dalam hal kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pendidikan yang baik juga harus mendorong pembelajaran sepanjang hayat, mendorong kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan nilai moral dan karakter yang positif.⁷

Menurut teori lain, kualitas pendidikan bisa diukur berdasarkan berbagai faktor, seperti kurikulum, pengajaran, fasilitas, tenaga pendidik, dan dukungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Selain itu, kualitas pendidikan juga dapat diukur berdasarkan hasil belajar siswa, seperti prestasi akademik, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan pekerjaan mereka.

Berdasarkan pendapat Sammons, kualitas pendidikan adalah suatu konsep yang relatif, yang tergantung pada tujuan serta nilai yang akan dicapai oleh suatu lembaga

⁶ Asep Saepudin, *Manajemen Kemitraan Sekolah dengan Masyarakat (Telaah Konsep, Strategi, dan Aplikasi)*, (Bandung, PT. Sarana Panca Karya Nusa, 2009), 18

⁷ Mustafa, Suryadi, *Landasan Teknologis sebagai Peningkatan Mutu dalam Pendidikan dan Pembelajaran: Kajian Pustaka*, (FONDATIA, 2022), 767-793

pendidikan. Menurut pendapat Samons, kualitas pendidikan terdiri dari empat dimensi: efektivitas (ukuran dalam mencapai tujuan pendidikan), efisiensi (ukuran dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien), kesetaraan (ukuran dalam memberi semua siswa kesempatan yang sama), dan kepuasan (ukuran dalam tingkat kepuasan guru, siswa, dan orang tua terhadap sistem pendidikan).⁸

4. Implementasi Pelibatan Masyarakat (komite) di MA Negeri 2 Kota Bandung berdasarkan IASP 2020

Dalam pengimplementasian tentunya ada beberapa peran komite yang diterapkan di MA Negeri 2 Kota Bandung, baik itu dalam perencanaan program sekolah, keterlibatan dalam pelaksanaan program sekolah ataupun sebagai pemberi masukan, atau pertimbangan dalam mengambil keputusan, serta sebagai pengawas atau pengontrol di MA Negeri 2 Kota Bandung. Karena jika dilihat berdasarkan IASP tahun 2020 pelibatan masyarakat atau komite ini mencakup, keikutsertaan komite dalam perencanaan, keikutsertaan komite dalam pelaksanaan program, keikutsertaan komite dalam pengawasan atau pengontrolan penyelenggaraan satuan Pendidikan, dan keikutsertaan komite dalam mendukung semua pelaksanaan program yang ada di MA Negeri 2 Kota Bandung. Sebelum memasuki pembahasan tentang bagaimana pengimplementasian pelibatan masyarakat (komite sekolah) yang dilakukan di MA Negeri 2 Kota Bandung, berikut adalah struktur organisasi Komite MA Negeri 2 Kota Bandung, dimana Komite madrasah terdiri dari anggota masyarakat yang berbeda, seperti perwakilan orang tua dan wali siswa yang dipilih Bersama melalui demokrasi dari seluruh jenjang Pendidikan, tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, RK, ulama, budayawan, pemuka adat, dan sebagainya, pejabat pemerintah setempat seperti kepala desa, lurah, polisi, koramil, dan lain-lain. Dibawah ini adalah struktur Komite MA Negeri 2 Kota Bandung.

Gambar 1.1 Struktur Komite MA Negeri 2 Kota Bandung

⁸ Harlyansyah, Hanim, *Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri Kota Samarinda*, (*Attractive: Innovative Education Journal*, 2022), 13-28



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

a. Pelibatan Masyarakat (komite sekolah) di MA Negeri 2 Kota Bandung

Keterlibatan komite MA Negeri 2 Kota Bandung ini terlibat dengan melaksanakan berbagai peran komite diantaranya:

1) Keterlibatan dalam perencanaan program MA Negeri 2 kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah MA Negeri 2 kota Bandung, pelibatan komite dalam perencanaan program madrasah di implementasikan atau dilaksanakan dalam Raker (rapat kerja) dimana rapat kerja ini dilakukan 1 tahun satu kali di akhir semester pembelajaran, dan didalam kegiatan Raker tersebut tentunya pihak madrasah mengundang komite madrasah dalam rangka perencanaan dan penyusunan program tahunan MA Negeri 2 Kota Bandung, Rapat rutin yang dilakukan dengan pihak madrasah pada setiap akhir semester, ini digunakan untuk membuat rumusan visi dan misi sekolah, menyusun RKAS dan RAPBS serta mengembangkan potensi kearah yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan yang ada di MA Negeri 2 Kota Bandung. Namun terkadang ada kendala dalam pelaksanaan ini dimana tidak semua keanggotaan komite bisa menghadiri karena berbagai kesibukan yang dihadapinya, namun ketua komite senantiasa selalu hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain penyusunan pihak komitepun mempertimbangkan standar sarana prasarana sekolah, kerjasama sekolah dengan masyarakat untuk kemajuan dan pengembangan sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pelaksanaan program sekolah. Sesuai dengan fungsi komite

sekolah sebagai lembaga pemberi pertimbangan, badan yang memberikan pertimbangan kepada sekolah atau yayasan. Sekolah dan lembaga pendidikan idealnya meminta komite sekolah untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Komite sekolah juga harus berpartisipasi dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini termasuk menentukan program unggulan sekolah. Ada juga program semesteran yang biasa dikoordinasikan dengan orangtua siswa, seperti kegiatan study toor, dalam perencanaan kegiatan tersebut tentunya akan melibatkan orangtua wali murid MA Negeri 2 kota Bandung untuk berkoordinasi baik itu dengan wali kelas ataupun pihak pelaksana program tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti bisa dilihat bahwa dalam pelibatan komite atau masyarakat yang dilakukan di MA Negeri 2 Kota Bandung ini telah diimplementasikan sesuai dengan IASP 2020, dimana komite terlibat dalam perencanaan penyusunan program yang dilaksanakan tiap satu tahun satu kali diakhir semester. Kemudian orangtua siswa terlibat dalam perencanaan program madrasah yang biasanya dilakukan di tiap semester seperti study toor, dimana orangtua murid di undang untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh pihak sekolah yang bertujuan untuk mengkoordinasikan program yang akan dilaksanakan.

2) Keterlibatan Komite dalam Pelaksanaan Program MA Negeri 2 Kota Bandung

Keterlibatan komite madrasah dalam pelaksanaan program ini terimplementasikan dalam bentuk dukungan yang selalu diberikan oleh pihak komite. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala sekolah di MA Negeri 2 Kota Bandung, beliau mengatakan

Dalam keterlibatan komite di pelaksanaan program memang tidak ditunjukkan dengan kehadiran atau keikutsertaan komite dalam pelaksanaan program tersebut saja, melainkan pihak komite selalu memberikan dukungan dengan memberikan bantuan dana, atau pencarian dukungan dari masyarakat sekitar ataupun dukungan dalam bentuk memberikan fasilitas. Jadi keterlibatannya tidak hanya harus menghadiri kegiatan pelaksanaan program saja. (Wawancara, 30 April 2024)

Jika dikaitkan dengan peran komite madrasah dimana komite sekolah berperan sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan), ini bisa dimaknai dengan keikutsertaan dalam berjalannya proses musyawarah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari dukungan komite terhadap kegiatan di MA Negeri 2 Kota Bandung yang dilaksanakan. Dibuktikan dengan beberapa saran serta masukan para anggota komite yang telah didokumentasikan dalam notulensi pertemuan tersebut. Dalam proses meningkatkan kualitas Pendidikan di

MA Negeri 2 Kota Bandung, komite sekolah berupaya menjalankan peran yang berkaitan dengan partisipasi dalam memberikan dukungan. Hal ini ditunjukkan dengan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang disusun oleh pihak sekolah ataupun memberikan dukungan baik berupa insial ataupun pikiran. Partisipasi komite di MA Negeri 2 Kota Bandung ini bisa dikategorikan sangat tinggi dalam mendukung program-program kegiatan pendidikan. Dengan mencari sponsor untuk kegiatan tersebut salah satu kegiatannya adalah ketikan akan mengadakan kegiatan beasiswa unggulan maka pihak komite menjalin kerjasama dengan pihak bang BRI untuk memberikan dukung dalam program beasiswa tersebut.

3) Keterlibatan Komite dalam pengawasan atau pengontrolan Program MA Negeri 2 Kota Bandung

Pelibatan komite sebagai evaluator di buktikan dengan pengawasan atau pengontrolan terhadap proses pengambilan suatu keputusan di MA Negeri 2 Kota Bandung, selain itu komite juga melakukan pengawasan terhadap mutu atau kualitas kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertingkan apakah kebijakan tersebut baik untuk kualitas Pendidikan atau akan mempengaruhi kebagusan kualitas Pendidikan. Kemudian melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan serta pelaksanaan program di MA Negeri 2 Kota Bandung, dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Selain itu komite sekolah juga mempunyai peran dalam proses transparansi penyaluran alokasi dana pendidikan termasuk dalam mengawasi data bantuan yang diberikan pusat kepada sekolah apakah benar digunakan untuk kebutuhan sekolah atau malah digunakan untuk hal lain, inipun perlu dipertanggungjawabkan. Pengalokasian dana baik itu dari pihak donator ataupun pemerintah pihak komite harus mengetahuinya apakah itu benar-benar digunakan secara efektif oleh pihak madrasah disinilah harus ada ternoniter pengalokasian dana, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebagaimana yang dikatakan wakil kepala sekolah MA Negeri 2 Kota Bandung dalam wawancanya sebagai berikut:

Pengecekan program yang sedang dan telah dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari upaya komite sekolah untuk mengontrol layanan pendidikan. Pengecekan ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sedang berlangsung. Komite sekolah juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dana BOS; setidaknya, pengawasan keuangan dilakukan setiap semester atau akhir tahun akademik. Berpartisipasi dalam pengendalian kegiatan layanan pendidikan berarti mengawasi program kerja yang sedang berlangsung. Selain itu, cari dan berikan arahan tentang proyek. Dalam hal ini, mereka

memeriksa pekerjaan tukang, keuangan, dan biaya barang, dan berpartisipasi dalam program kerja sekolah. (Wawancara, 30 April 2024)

Jika dilihat dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian peran komite sebagai pengawas atau pengontrol di MA Negeri 2 Kota Bandung ini tercapai dan terlaksana dengan baik.

b. Persepsi Masyarakat terhadap MA Negeri 2 Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu oragtua siswa kls 11 MA Negeri 2 Kota Bandung, tentang bagaimana pendapatnya mengenai keterlibatan orangtua terhadap sekolah tersebut. Hasil wawancara menunjukkan setiap massyarakat mempunyai persepsi baik atu positif terhadap kualitas Pendidikan yang ada di MA Negeri 2 Kota bandung, dimana masyarakat merasa bahwa dalam pelaksanaan program-program di MA Negeri 2 kota Bandung ini selalu bagus dan berkualitas, terlebih sekolah ini telah mempunyai banyak prestasi baik tingkat kota ataupun nasional. Kepuasan masyarakat terhadap pelibatangnya baik dalam perencanaan program ataupun evaluasi pembelajaran anak yang sering dilakukan pada akhir semester ini menambah baiknya persepsi masyarakat terhadap sekolah MA Negeri 2 Kota Bandung.

Tempat terbaik untuk belajar adalah masyarakat, peranan masyarakat untuk pembangunan pendidikan sangat di butuhkan di era demokrasi seperti saat ini. Masyarakat semakin menjadi komunitas pendidikan yang unik, dan mereka bertanggung jawab atas pendidikan generasi muda. Pendidikan komunitas juga dikenal sebagai pembelajaran dan pengembangan berbasis komunitas atau pendidikan berbasis masyarakat.⁹ Salah satu fokus utama reformasi pendidikan dan pengelolaan sekolah di berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia saat ini adalah gagasan partisipasi masyarakat. Keputusan politik tentang desentralisasi pemerintahan akan meningkatkan pentingnya pendidikan berbasis masyarakat. Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, "pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat."¹⁰

⁹ Andi Achmad Munaszar Mulia, Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat, diakses melalui: <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/2867/613>

¹⁰ D. Hapsari Amalia, Nurkolis, Soedjono, *Pengaruh Kepemimpinan Sekolah dan Pelibatan warga terhadap Implentasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*, (Didaktik, 2023), 3938-3951

Pelibatan masyarakat bertujuan untuk memberikan kekuatan atau kekuatan kepada yang lemah. Pemberdayaan adalah proses di mana peran masyarakat diprioritaskan dan kekuatan masyarakat menjadi lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberian kesempatan, pengetahuan, dan keahlian agar mereka dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensinya dan mengembangkannya melalui kolaborasi, kerja sama yang mendalam, dan kolaborasi dengan orang lain.¹¹

c. Peran Komite MA Negeri 2 Kota Bandung dalam Peningkatan Kualita Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di MA Negeri 2 Kota Bandung dimana komite sekolah mempunyai peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Pendidikan di MA Negeri 2 Kota Bandung. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak wakil kepala sekolah dalam wawancaranya beliau mengatakan:

Dalam proses menjaga kualitas Pendidikan MAN 2 tentunya komite terlibat untuk menjaganya dimana seperti yang kita ketahui bawah MAN 2 sudah terakreditasi A, tentunya dalam bentuk akreditasi A ini tidak lepas dari keterlibatan komite kita, jika dilihat oleh saya komite di MAN 2 mempunyai 3 peranan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Pendidikan, seperti komite harus berperan untuk memberikan masukan positif untuk kemajuan sekolah, terus harus memberikan dukungan baik berupa pencarian dana ataupun pikirannya, terlebih peran komite harus sering mengawasi baik secara langsung ataupun lewat media social seperti yang dilakukan oleh pihak komite MAN 2, pasti selalu mengawasi baik lewat chatt ataupun secara langsung dating ngobrol dengan pihak sekolah. (Wawancara, 30 April 2024)

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020. Satuan Pendidikan harus mempunyai strategi yang dapat dikembangkan salah satunya dengan menjadikan Lembaga pendidikan sebagai lembaga jasa, yakni lembaga yang memberikan pelayanan (service) berdasar apa yang diinginkan oleh pelanggan (customer). Komite MAN 2 Kota Bandung dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan pendataan keadaan sosial serta ekonomi keluarga siswa serta sumber daya pendidikan yang tersedia di masyarakat. Memberikan saran atau masukan kepada sekolah pada saat melakukan proses perencanaan program,

¹¹ Dyah Nur, Ibrahim, Desi, *Pelibatan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Administrasi dan Pendidikan, 2018), 293-301

merumuskan kebijakan, serta pemutusan visi, misi madrasah yang akan ditetapkan menjadi tujuan dari MA Negeri 2 Kota Bandung. Selain itu pihak komite mempunyai peran untuk membantu pihak sekolah dalam pengembangan kurikulum muatan local dan membantu dalam memberikan arahan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir memverifikasi RAPBS yang diberikan kepala sekolah kepada pihak komite dengan memberikan pengesahan terhadapnya setelah proses verifikasi diselesaikan dalam rapat pleno komite sekolah.

- 2) Memberi motivasi atau dukungan kepada sekolah untuk mencegah penyebaran narkoba di lingkungan sekolah dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Mengadopsi ide subsidi silang untuk penarikan pembiayaan dari orangtua siswa.
- 3) Mengevaluasi atau melakukan pengawasan terhadap segala bentuk *Planning* serta pelaksanaan program dengan meminta sekolah untuk menjelaskan hasil belajar siswa dan menerima saran, ide kreatif, dan masukan dari masyarakat.
- 4) Berpartisipasi dalam menolong sekolah dalam membangun hubungan serta kerja sama dengan wali siswa dan masyarakat. mengikuti pertemuan atau rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru secara rutin ataupun insidental. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kolaborasi.¹²

C. Penutup

Pelibatan masyarakat atau komite sekolah meupak hal penting untuk diimplementasikan sebagaimana yang telah diimplementasikan di MA Negeri 2 Kota Bandung, dengan melibatkan komite sekolah dalam rapat tahunan, rapat tiap akhir semester dan memberi masukan dalam setiap pelaksanaan program di MA Negeri 2 Kota Bandung. Selai itu orangtua siswapun dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang memang membutuhkan aspirasi atau dukungan dari wali murid. Dalam menjaga kualitas Pendidikan tentunya pelibatan masyarakat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sangat dibutuhkan, agar dalam perencanaannya pihak lembaga Pendidikan bisa memahmi dan mengetahui apa dan bagaimana Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat, dan dengan dibentuknya komite sekolah bisa mewakili aspirasi masyarakat terhadap lembaga satuan Pendidikan. untuk itu besar harapan saya di setiap satuan lembaga Pendidikan bisa dengan optimal dan maksimal dalam implementasi pelibatan masyarakat atau komite dengan tujuan

¹² Anwar Ismail, *Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Smp Al-Khairaat Kalumpang Kota Ternate*, (EDUKASI: Jurnal Pendidikan, 2015), 165-177

untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Karena berdasarka IASP tahun 2020 pelibatan masyarakat merupakan salah satu poin dari manajemen berbasis sekolah.

Referensi

- Amalia, D. Hapsari, Nurkolis, Soedjono, *Pengaruh Kepemimpinan Sekolah dan Pelibatan warga terhadap Implentasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*. Didaktik. 2023.
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pess, 2012.
- Hanim, Harlyansyah. “Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri Kota Samarinda”. *Attractive: Innovative Education Journal*. 2022.
- Hartono, B., & Hidayat, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Metode Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 51(3), 203-213. <https://doi.org/10.23887/jpp.v51i3.9052>
- Islam Anwar. *Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Smp Al-Khairaat Kalumpang Kota Ternate*. EDUKASI: Jurnal Pendidikan. 2015.
- Megianti, E, Y, *Pemberdayaan Komite Sekolah Kajian Konsep dan Implementasinya*. Jurnal SAP. 2016.
- Nur, Dyah, Ibrahim, Desi. “Pelibatan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan” *Jurnal Administrasi dan Pendidikan*. 2018.
- Rusdiana, Ahmad, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Keimplementasian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Sayuti, Ahmad, *Peranan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Mubtadaiin. 2022
- Saepudin, Asep. *Manajemen Kemitraan Sekolah dengan Masyarakat: Telaah Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa. 2009.
- Suryadi, Mustafa. *Landasan Teknologis sebagai Peningkatan Mutu dalam Pendidikan dan Pembelajaran: Kajian Pustaka*. FONDATIA, 2022.
- Suryadi, R., & Wibowo, A. (2019). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 32-45. <https://doi.org/10.21009/jmp.v7i1.567>
- Teguh, Triwiyanto. “Hambatan Implementasi Program Kerja Komite Sekolah untuk Meningkatkan Peran serta Masyarakat”. *Jurnal Manajmen dan Supervisi Pendidikan*. 2018.